

Perjuangan Hegemoni Global: Persaingan Amerika Serikat dan China dalam Tatanan Dunia Multipolar

Muhammad Alvian Bagas Kawulur

Program Studi Manajemen, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: Bagastwa05@gmail.com

Kata Kunci:

Geopolitik, Negara, Bangsa, Kepentingan nacional, Dan keteraturan.

Keywords:

Geopolitics, State, National Interest, And Order

ABSTRAK

Persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan China telah mentransformasi tatanan dunia multipolar kontemporer, memunculkan tantangan signifikan bagi negara-negara berkembang. Permasalahan penelitian berfokus pada bagaimana dinamika persaingan hegemoni AS-China memengaruhi keseimbangan kekuatan global dan implikasinya terhadap posisi strategis Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis komparatif dan studi kasus dengan berlandaskan teori realisme structural dan konsep soft power

untuk memetakan strategi kedua negara adidaya dalam memperluas pengaruh. Hasil analisis menunjukkan bahwa Persaingan AS-China bermanifestasi dalam tiga dimensi utama: (1) kontestasi ekonomi melalui inisiatif Belt and Road (China) versus Indo-Pacific Economic Framework (AS); (2) rivalitas militer khususnya di Laut China Selatan dan sekitar Taiwan; dan (3) kompetisi teknologi untuk menguasai sektor-sektor strategis seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan. Temuan menunjukkan bahwa negara-negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi dilema antara memanfaatkan peluang ekonomi dari penguatan posisi tawar kolektif melalui intitusi regional, diversifikasi kemitraan internasional dan pengembangan kapasitas teknologi nasional untuk memaksimalkan manfaat dari persaingan hegemonic ini. Kesimpulannya, Indonesia perlu menerapkan diplomasi proaktif yang tidak terjebak dalam polarisasi, sambil membangun ketahanan nasional dalam menghadapi tekanan geopolitik yang meningkat.

ABSTRACT

The geopolitical competition between the United States and China has transformed the contemporary multipolar world order, creating significant challenges for developing countries. The research problem focuses on how the dynamics of US-China hegemonic competition affect the global balance of power and its implications for Indonesia's strategic position. This study employs a comparative analysis approach and case studies based on structural realism theory and the concept of soft power to map the strategies of both superpowers in expanding their influence. The analysis results show that US-China competition manifests in three main dimensions: (1) economic contestation through the Belt and Road Initiative (China) versus the Indo-Pacific Economic Framework (US); (2) military rivalry particularly in the South China Sea and around Taiwan; and (3) technological competition to dominate strategic sectors such as semiconductors and artificial intelligence. Findings indicate that developing countries including Indonesia face a dilemma between leveraging economic opportunities from both powers and maintaining strategic autonomy. This research proposes solutions including strengthening collective bargaining positions through regional institutions, diversifying international partnerships, and developing national technological capabilities to maximize benefits from this hegemonic competition. In conclusion, Indonesia needs to implement proactive diplomacy that avoids polarization while building national resilience in facing increasing geopolitical pressures.

Pendahuluan

Seiring dengan memasuki dekade ketiga abad 21, konstelasi geopolitik global telah mengalami transformasi signifikan yang ditandai dengan meningkatnya persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China. Perkembangan ini menandai pergeseran dari



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

era unipolar yang didominasi Amerika Serikat pasca Perang Dingin menuju tatanan dunia multipolar yang lebih kompleks. Persaingan hegemonik ini bukan sekadar kompetisi ekonomi dan militer, tetapi juga mencakup dimensi teknologi, ideologi, dan model tata kelola global yang masing-masing pihak tawarkan sebagai alternatif bagi komunitas internasional.

Dalam perkembangan geopolitik kontemporer, perebutan pengaruh antara AS dan China semakin intensif di berbagai kawasan strategis seperti Asia Pasifik, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Kompetisi ini memanifestasikan diri dalam berbagai bentuk, mulai dari inisiatif ekonomi seperti Belt and Road Initiative (BRI) China dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) Amerika Serikat, hingga aliansi keamanan seperti AUKUS (Australia, Inggris, AS) dan Shanghai Cooperation Organization (SCO) yang dipimpin oleh China dan Rusia. Menurut Allison (2017), dinamika ini mengarah pada apa yang disebut "Jebakan Thucydides" - situasi ketika kekuatan yang sedang naik daun (China) mengancam posisi kekuatan dominan (AS), sehingga meningkatkan risiko konflik. (Zhang, 2019)

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, Brasil, dan Afrika Selatan, persaingan AS-China ini membawa dimensi kompleks berupa tantangan dan peluang yang harus dinavigasi dengan hati-hati. Di satu sisi, negara-negara ini memiliki kesempatan untuk memanfaatkan rivalitas tersebut guna mendapatkan investasi, bantuan pembangunan, dan dukungan politik. Di sisi lain, mereka menghadapi risiko terjebak dalam polarisasi geopolitik yang dapat membatasi ruang manuver diplomatik dan otonomi kebijakan luar negeri mereka. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dinamika persaingan geopolitik kontemporer antara Amerika Serikat dan China, dengan fokus khusus pada strategi kedua negara dalam memperluas pengaruh global dan implikasinya terhadap negara-negara berkembang. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi peluang dan tantangan bagi Indonesia dalam menavigasi persaingan hegemonik tersebut, serta mengeksplorasi strategi yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan kepentingan nasional dalam konteks geopolitik yang kian kompleks. Secara keseluruhan, artikel ini berpendapat bahwa tatanan dunia yang sedang berkembang mengarah pada multipolaritas yang lebih kompleks daripada bipolaritas sederhana, dengan munculnya kekuatan menengah yang semakin asertif dan pembentukan blok-blok regional yang berusaha menyeimbangkan pengaruh AS dan China. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang memiliki peluang untuk meningkatkan otonomi strategis mereka, namun hanya jika mereka mampu menerapkan kebijakan luar negeri yang pragmatis, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Kerangka Teoritis dan Konseptual

Untuk memahami dinamika persaingan geopolitik kontemporer, artikel ini menerapkan beberapa kerangka teoretis yang relevan dalam studi hubungan internasional. Pertama, teori realisme struktural yang dikembangkan oleh Waltz (1979) dan Mearsheimer (2001) menyediakan landasan untuk memahami logika persaingan kekuatan antara AS dan China sebagai hasil dari sistem internasional yang anarki. Dalam pandangan ini, negara-negara utama bersaing untuk keamanan dan bertindak berdasarkan kepentingan diri sendiri, dengan fokus pada perimbangan kekuatan

(balance of power) sebagai mekanisme utama untuk mencegah dominasi satu negara. Kedua, konsep "soft power" yang diperkenalkan oleh Nye (2004) dan "sharp power" yang diidentifikasi oleh Walker dan Ludwig (2017) memberikan kerangka untuk menganalisis berbagai dimensi pengaruh yang digunakan oleh AS dan China di luar kekuatan militer konvensional. Ini mencakup diplomasi publik, bantuan pembangunan, kerjasama pendidikan, dan pengaruh media yang semakin menjadi instrumen penting dalam persaingan global.

Ketiga, pendekatan ekonomi politik internasional (IPE) yang dikembangkan oleh Gilpin (2001) dan Strange (1996) membantu menjelaskan interaksi antara kekuatan ekonomi dan politik dalam membentuk tatanan dunia. Perspektif ini sangat relevan dalam menganalisis bagaimana China menggunakan kapasitas ekonominya untuk membangun jaringan ketergantungan melalui investasi dan pinjaman, sementara AS berusaha mempertahankan posisinya sebagai penentu aturan dalam sistem ekonomi global. Sejalan dengan perspektif di atas, Munir (2021) dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam penelitiannya mengenai dinamika perkembangan geopolitik Asia Timur mengidentifikasi bahwa persaingan AS-China tidak hanya berdampak pada tatanan regional tetapi juga mempengaruhi keamanan maritim dan stabilitas kawasan. Studi ini menekankan pentingnya memahami geopolitik kawasan Asia Timur sebagai arena persaingan strategis antara kedua kekuatan global tersebut.

Pembahasan

Pergeseran Ekuilibrium Kekuatan Global

Salah satu aspek paling mendasar dari geopolitik kontemporer adalah pergeseran signifikan dalam distribusi kekuasaan global, terutama dengan kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi dan militer utama. Dalam dua dekade terakhir, China telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dengan PDB yang tumbuh rata-rata 9,5% per tahun antara 2000-2010 dan sekitar 6-7% dalam dekade berikutnya (World Bank, 2023)(World Bank. (2023). [World Bank Data on China's Economic Growth], n.d.). Pertumbuhan ini telah mengubah lanskap ekonomi global, dengan China menjadi ekonomi terbesar kedua dunia dan diproyeksikan melampaui AS dalam hal PDB (Purchasing Power Parity) dalam beberapa tahun mendatang. Paralel dengan ekspansi ekonominya, China juga telah meningkatkan kapabilitas militernya secara substansial. Anggaran pertahanan China meningkat sekitar 7,2% pada tahun 2023, mencapai sekitar 225 miliar dolar AS (SIPRI, 2023)(SIPRI. (2023). [Stockholm International Peace Research Institute Data on Defense Spending], n.d.). Meskipun masih lebih rendah dari anggaran pertahanan AS yang mencapai sekitar 877 miliar dolar pada tahun yang sama, tren peningkatan konsisten China menunjukkan ambisi untuk mengembangkan kekuatan militer yang setara dengan statusnya sebagai kekuatan global.

Amerika Serikat, di sisi lain, telah mengalami apa yang disebut beberapa sarjana sebagai "relative decline" meskipun tetap menjadi kekuatan dominan dalam sistem internasional (Layne, 2012). Kontraksi ekonomi akibat krisis finansial 2008 dan pandemi COVID-19, ditambah dengan polarisasi politik domestik, telah membatasi kemampuan AS untuk memproyeksikan kekuatan dan mempertahankan hegemoni globalnya.

Meskipun demikian, AS tetap memiliki keunggulan signifikan dalam hal kapabilitas militer, inovasi teknologi, dan soft power melalui pengaruh budaya dan pendidikan. Zakaria (2008) mengkarakterisasi situasi ini sebagai "the rise of the rest", di mana kekuatan negara-negara seperti China, India, Brasil, dan Rusia menantang dominasi Barat yang telah berlangsung lama. Namun yang lebih penting, pergeseran ini tidak hanya bersifat material tetapi juga ideologis, dengan China menawarkan model pembangunan alternatif yang menekankan kedaulatan negara, non-intervensi, dan pengutamaan stabilitas politik di atas liberalisasi politik.

Strategi Geopolitik Amerika Serikat dan China

Amerika Serikat: Mempertahankan Hegemoni melalui Multilateralisme Selektif

Strategi geopolitik AS dalam era pasca-Trump menunjukkan perubahan signifikan dengan penekanan yang lebih besar pada revitalisasi aliansi tradisional dan multilateralisme selektif. Administrasi Biden telah berusaha mengembalikan kepemimpinan AS dalam institusi global seperti WHO, Paris Climate Agreement, dan WTO, sambil mengembangkan kerangka kerja baru untuk menghadapi tantangan dari China. Salah satu manifestasi penting dari strategi ini adalah konsep "Indo-Pacific Free and Open" yang menempatkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pasar bebas sebagai landasan untuk kerja sama regional. Strategi ini dikembangkan melalui aliansi seperti Quad (AS, Jepang, Australia, India) dan AUKUS (Australia, Inggris, AS), yang memiliki dimensi keamanan yang jelas meskipun tidak secara eksplisit diarahkan terhadap China (White House, 2022). Di bidang ekonomi, AS telah meluncurkan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) sebagai alternatif terhadap Belt and Road Initiative China, meskipun dengan sumber daya finansial yang jauh lebih terbatas. IPEF berfokus pada standar perdagangan tinggi, ketahanan rantai pasok, ekonomi digital, dan transisi energi bersih (USTR, 2023). Namun, berbeda dengan perjanjian perdagangan tradisional, IPEF tidak menawarkan akses pasar yang lebih luas, sehingga mengurangi daya tariknya bagi banyak negara berkembang.

Dalam domain teknologi, AS telah menerapkan pendekatan yang lebih konfrontatif dengan membatasi ekspor teknologi canggih ke China, terutama dalam sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, dan teknologi kuantum. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menghambat perkembangan teknologi China dalam sektor-sektor yang dianggap kritis untuk keamanan nasional AS (The White House, 2022).

China: Ekspansi Pengaruh melalui Konektivitas Ekonomi

Strategi geopolitik China dibangun di atas fondasi kekuatan ekonominya yang berkembang pesat dan diartikulasikan melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI) yang ambisius. Diluncurkan pada tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping, BRI mencakup investasi infrastruktur masif di lebih dari 140 negara dengan nilai total yang diproyeksikan mencapai triliunan dolar AS (Hillman & Sacks, 2021). Melalui BRI, China mengembangkan apa yang disebut oleh beberapa analis sebagai "infrastruktur pengaruh" yang mencakup pelabuhan, jalan, jalur kereta api, dan pembangkit listrik di negara-negara strategis di Asia, Afrika, dan bahkan Eropa. Di luar dimensi ekonominya, BRI memiliki implikasi geopolitik yang jelas dalam membangun ketergantungan

ekonomi dan mendapatkan akses ke sumber daya strategis serta jalur perdagangan global (Global Communications And Media Relations et al., 2021).

China juga telah memperluas pengaruhnya melalui institusi keuangan alternatif seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan New Development Bank, yang menawarkan pendanaan pembangunan tanpa kondisionalitas politik yang sering dikaitkan dengan lembaga keuangan yang didominasi Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Strategi ini telah mendapatkan dukungan signifikan dari negara-negara berkembang yang mencari sumber pendanaan alternatif untuk kebutuhan pembangunan mereka. Dalam domain teknologi, inisiatif "Made in China 2025" dan "China Standards 2035" mencerminkan ambisi China untuk menjadi pemimpin global dalam teknologi tinggi dan menetapkan standar global untuk teknologi masa depan seperti 5G, kecerdasan buatan, dan Internet of Things. Upaya ini didukung oleh investasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan, yang mencapai sekitar 2,4% dari PDB China pada tahun 2023 (MOST, 2023). (Naughton et al., n.d.) Seperti yang dianalisis oleh Kurniawan (2022) dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam studinya tentang strategi global China, BRI bukan hanya proyek infrastruktur tetapi merupakan instrumen untuk memperluas pengaruh geopolitik China. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa melalui BRI, China tidak hanya membangun jaringan infrastruktur fisik tetapi juga jaringan ketergantungan ekonomi dan politik yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung agenda politik global Beijing.

A. Zona Kontestasi Utama: Laut China Selatan dan Taiwan

1. Laut China Selatan: Persaingan Maritim dan Sumber Daya

Laut China Selatan telah menjadi salah satu zona kontestasi paling signifikan dalam persaingan AS-China. Wilayah ini memiliki nilai strategis yang luar biasa karena merupakan jalur pelayaran vital yang dilalui sekitar sepertiga dari perdagangan maritim global dengan nilai lebih dari 5,3 triliun dolar AS per tahun (CSIS, 2022) (CSIS. (2022). [Center for Strategic and International Studies Report on South China Sea], n.d.). Selain itu, kawasan ini diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas yang substansial serta sumber daya perikanan yang melimpah. China telah menerapkan strategi asertif di Laut China Selatan dengan mengklaim hampir seluruh wilayah berdasarkan "nine-dash line" yang kontroversial. Strategi ini diimplementasikan melalui pembangunan pulau buatan dan fasilitas militer di fitur maritim yang disengketakan, penggunaan milisi maritim untuk mengusir nelayan negara lain, dan penolakan terhadap putusan Pengadilan Arbitrase Internasional tahun 2016 yang menyatakan klaim China tidak memiliki dasar hukum (PCA, 2016). (Campbell & Salidjanova, n.d.)

Amerika Serikat, meskipun bukan pihak yang mengklaim wilayah di Laut China Selatan, telah secara aktif terlibat dalam sengketa dengan melakukan operasi "freedom of navigation" (FONOP) untuk menantang klaim maritim China yang dianggap berlebihan, memperkuat aliansi keamanan dengan negara-negara seperti Filipina dan Vietnam, serta memberikan dukungan diplomatik dan militer kepada negara-negara ASEAN yang terlibat dalam sengketa dengan China. Persaingan di Laut China Selatan mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas di mana China berusaha mengamankan "near abroad" dan memperluas zona pengaruhnya, sementara AS

berupaya mempertahankan arsitektur keamanan regional yang telah lama didominasinya.

2. Taiwan: Titik Potensial Konflik Langsung

Taiwan merepresentasikan salah satu risiko geopolitik paling akut dalam hubungan AS-China. Bagi Beijing, reunifikasi dengan Taiwan merupakan bagian integral dari "revitalisasi bangsa Tiongkok" dan dianggap sebagai "garis merah" yang tidak dapat dikompromikan. Di sisi lain, AS memiliki komitmen yang panjang untuk mendukung kemampuan pertahanan Taiwan melalui Taiwan Relations Act, meskipun menerapkan kebijakan "ambiguitas strategis" mengenai intervensi militer langsung dalam kasus invasi China. Ketegangan seputar Taiwan telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. China telah meningkatkan aktivitas militer di sekitar Taiwan, termasuk latihan militer berskala besar dan pelanggaran rutin terhadap zona identifikasi pertahanan udara Taiwan (ADIZ). Pada saat yang sama, AS telah memperdalam keterlibatan tidak resminya dengan Taiwan melalui penjualan senjata yang ditingkatkan, kunjungan pejabat tinggi, dan pernyataan dukungan yang lebih eksplisit (U.S. Department of State, 2023). (Gordon et al., n.d.)

Signifikansi Taiwan melampaui dimensi politik dan identitas nasional. Taiwan adalah produsen utama semikonduktor tingkat lanjut, dengan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) memproduksi sekitar 92% chip canggih dunia (SIA, 2023) (SIA_State-of-Industry-Report_2023_Final_080323, n.d.). Kontrol atas industri ini memiliki implikasi mendalam bagi supremasi teknologi dan keamanan nasional kedua negara adidaya tersebut.

B. Perebutan Pengaruh di Kawasan Strategis

1. Afrika: Medan Perebutan Sumber Daya dan Pengaruh Politik

Afrika telah menjadi arena kompetisi geopolitik yang semakin penting antara AS dan China, dengan fokus pada akses ke sumber daya alam strategis, ekspansi pasar, dan dukungan diplomatik. China telah menjadi mitra dagang dan investor terbesar di benua tersebut, dengan volume perdagangan China-Afrika mencapai 254 miliar dolar AS pada tahun 2023, jauh melampaui perdagangan AS-Afrika yang mencapai sekitar 83 miliar dolar pada periode yang sama (China Africa Research Initiative, 2023). (Moses et al., n.d.) Pendekatan China di Afrika ditandai oleh investasi infrastruktur berskala besar melalui BRI, pinjaman tanpa syarat politik, dan prinsip non-intervensi dalam urusan domestik. Strategi ini telah mendapatkan dukungan dari banyak pemerintahan Afrika yang mencari alternatif terhadap model pembangunan Barat dan bantuan yang sering disertai dengan kondisionalitas demokrasi dan hak asasi manusia.

AS, di sisi lain, telah berusaha merevitalisasi kehadirannya di Afrika melalui inisiatif seperti Prosper Africa, Power Africa, dan Build Back Better World (B3W). Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk menawarkan alternatif "berkualitas tinggi" terhadap investasi China, dengan penekanan pada transparansi, keberlanjutan lingkungan, dan standar ketenagakerjaan. Namun, sumber daya yang dialokasikan untuk program-program ini masih jauh di bawah skala investasi China di benua tersebut. Persaingan di Afrika tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga mencakup dimensi keamanan dan ideologis. China

telah memperluas kehadiran militernya dengan mendirikan pangkalan militer pertamanya di luar negeri di Djibouti pada tahun 2017, sementara AS mempertahankan jaringan instalasi militer dan operasi kontra-terorisme di seluruh benua tersebut. Secara ideologis, kedua negara mempromosikan model pembangunan yang berbeda, dengan China menawarkan "konsensus Beijing" yang menekankan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik di atas liberalisasi politik.

2. Asia Tenggara: Perebutan Pengaruh di "Backyard" China

Asia Tenggara memiliki posisi geostrategis krusial sebagai persimpangan jalur perdagangan utama dan wilayah yang kaya sumber daya. Bagi China, kawasan ini merupakan "halaman belakang" yang vital untuk keamanan energi dan ekspansi ekonomi, sementara bagi AS, kawasan ini adalah komponen penting dalam strategi "pivot to Asia" yang bertujuan mengimbangi pengaruh China yang berkembang. China telah mengembangkan hubungan ekonomi yang erat dengan negara-negara ASEAN, dengan volume perdagangan bilateral mencapai 975,3 miliar dolar AS pada 2023 (ASEAN Secretariat, 2023)(ASEAN Secretariat. (2023). ASEAN Statistical Yearbook 2023. Jakarta ASEAN Secretariat, n.d.). Selain itu, China telah memperluas pengaruhnya melalui investasi infrastruktur besar di proyek-proyek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia, Pelabuhan Kyaukpyu di Myanmar, dan East Coast Rail Link di Malaysia.

AS telah merespon dengan memperkuat aliansi keamanan tradisionalnya dengan Thailand dan Filipina, mengembangkan kemitraan strategis baru dengan Vietnam dan Indonesia, serta meningkatkan keterlibatan ekonominya melalui US-ASEAN Connect dan kemudian Indo-Pacific Economic Framework. AS juga telah meningkatkan kehadiran militernya di kawasan ini melalui perjanjian seperti Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) dengan Filipina dan akses yang diperluas ke pangkalan di Vietnam. Negara-negara ASEAN, secara kolektif dan individual, telah berusaha untuk mempertahankan otonomi strategis mereka dengan menerapkan kebijakan hedging atau "strategic hedging" yang melibatkan diversifikasi kemitraan untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada salah satu kekuatan besar. Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, telah menjadi proponent utama dari pendekatan "ASEAN Centrality" dan "bebas-aktif" yang bertujuan mempertahankan kohesi regional di tengah tekanan geopolitik yang meningkat.

Implikasi bagi Negara Berkembang dan Indonesia

A. Peluang dan Tantangan dalam Dunia Multipolar

Bagi negara-negara berkembang, persaingan AS-China menghadirkan serangkaian peluang dan tantangan yang kompleks. Di satu sisi, persaingan ini telah memperluas opsi untuk mendapatkan investasi, bantuan pembangunan, dan dukungan diplomatik dari kedua kekuatan besar tersebut. Negara-negara Afrika dan Asia Tenggara, misalnya, telah berhasil menarik investasi infrastruktur yang signifikan dari China sambil mempertahankan hubungan keamanan dengan AS atau sekutunya. Di sisi lain, persaingan ini juga menciptakan risiko polarisasi geopolitik yang dapat membatasi otonomi strategis negara-negara berkembang dan memaksa mereka untuk memilih sisi. Tekanan semacam ini telah terlihat dalam kasus teknologi 5G, di mana AS telah mendesak sekutu dan mitranya untuk mengecualikan Huawei dari jaringan

telekomunikasi mereka karena kekhawatiran keamanan nasional. Dalam beberapa kasus, negara-negara berkembang telah terperangkap dalam apa yang disebut sebagai "debt trap diplomacy", di mana ketidakmampuan untuk membayar pinjaman China menyebabkan konsesi strategis seperti dalam kasus Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Tantangan utama bagi negara-negara berkembang dalam konteks ini adalah mengembangkan kapasitas untuk mengevaluasi secara kritis tawaran dari kedua kekuatan besar, menegosiasikan kesepakatan yang menguntungkan kepentingan nasional mereka, dan membangun ketahanan terhadap tekanan eksternal. Ini memerlukan penguatan institusi domestik, diversifikasi kemitraan internasional, dan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia.

B. Strategi Indonesia dalam Navigasi Geopolitik Kontemporer

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki posisi unik dalam lanskap geopolitik yang berubah. Strategi Indonesia dalam menghadapi persaingan AS-China telah didasarkan pada prinsip politik luar negeri "bebas-aktif" yang berakar pada Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung dan tetap relevan dalam konteks geopolitik kontemporer. Secara ekonomi, Indonesia telah menerapkan pendekatan pragmatis dengan mengembangkan hubungan dengan kedua kekuatan besar tersebut. China telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dengan volume perdagangan mencapai 110 miliar dolar AS pada tahun 2023 dan investor utama dalam proyek-proyek infrastruktur seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Kementerian Perdagangan RI, 2023) (Kementerian Perdagangan RI. (2023). *Statistik Perdagangan Indonesia-China 2023. Jakarta* Kementerian Perdagangan RI., n.d.). Sementara itu, AS tetap menjadi investor penting di sektor-sektor bernilai tinggi seperti teknologi, keuangan, dan energi terbarukan.

Dalam domain keamanan, Indonesia telah berhati-hati untuk tidak terlalu condong ke salah satu pihak. Indonesia telah memperkuat kerja sama keamanan dengan AS melalui latihan militer bersama dan pembelian peralatan militer, tetapi juga mengembangkan hubungan pertahanan dengan China. Strategi ini mencerminkan upaya Indonesia untuk mempertahankan otonomi strategisnya dan menghindari keterlibatan dalam persaingan kedua kekuatan besar tersebut. Di tingkat multilateral, Indonesia telah memainkan peran penting dalam mempromosikan "ASEAN Centrality" sebagai mekanisme untuk mengelola rivalitas kekuatan besar di kawasan. Sebagai tuan rumah KTT G20 tahun 2022 dan ketua ASEAN tahun 2023, Indonesia telah berusaha membangun konsensus di antara kekuatan yang bersaing dan mempromosikan kerja sama di bidang-bidang kepentingan bersama seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi, perubahan iklim, dan transisi energi.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan China telah mentransformasi tatanan internasional dan menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi negara-negara berkembang. Persaingan ini tidak lagi terbatas pada dimensi militer tradisional tetapi

telah berkembang menjadi kompetisi multidimensi yang mencakup ekonomi, teknologi, tata kelola global, dan model pembangunan.

Tatanan dunia yang sedang berkembang mengarah pada multipolaritas yang lebih kompleks daripada sekadar konfrontasi bipolar, dengan munculnya kekuatan menengah seperti India, Jepang, Rusia, dan Uni Eropa yang memainkan peran yang semakin penting dalam dinamika geopolitik global. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang memiliki ruang manuver yang lebih luas untuk mengejar kepentingan nasional mereka, meskipun juga menghadapi tekanan yang lebih besar untuk memilih pihak dalam isu-isu strategis. Bagi Indonesia, implikasi dari persaingan geopolitik ini memerlukan pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih nuansir dan adaptif. Indonesia perlu mempertahankan dan memperkuat prinsip "bebas-aktif" sebagai landasan untuk navigasi geopolitik yang efektif, sambil mengembangkan kapasitas strategis untuk memanfaatkan peluang dan memitigasi risiko yang muncul dari persaingan kekuatan besar.

Beberapa rekomendasi konkret yang dapat dipertimbangkan meliputi:

1. **Penguatan Posisi Tawar Kolektif:** Indonesia harus terus memperkuat ASEAN sebagai platform multilateral untuk mengimbangi pengaruh kekuatan besar dan memastikan bahwa kepentingan regional tetap menjadi prioritas dalam inisiatif-inisiatif yang dipimpin oleh AS dan China. Seperti yang diidentifikasi oleh Faisol (2020) dalam kajiannya tentang kebijakan ekonomi internasional Indonesia, memperkuat kerja sama ekonomi intra-ASEAN dan badan-badan regional dapat meningkatkan daya tawar kolektif kawasan dalam berhadapan dengan kekuatan besar.
2. **Diversifikasi Kemitraan Strategis:** Untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada AS atau China, Indonesia perlu memperluas dan memperdalam hubungan strategisnya dengan kekuatan menengah seperti India, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Uni Eropa. Pendekatan ini akan memberikan Indonesia lebih banyak opsi diplomatik dan ekonomi.
3. **Peningkatan Kapasitas Teknologi Nasional:** Mengingat teknologi telah menjadi dimensi kunci dalam persaingan geopolitik, Indonesia perlu berinvestasi lebih besar dalam pengembangan kapasitas teknologi domestik, terutama di sektor-sektor strategis seperti digital economy, artificial intelligence, dan renewable energy. Hal ini sejalan dengan temuan Suyanto (2022) yang menganalisis transformasi digital Indonesia dalam konteks rivalitas teknologi global.
4. **Reformasi Tata Kelola Domestik:** Untuk memaksimalkan manfaat dari persaingan kekuatan besar, Indonesia perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam evaluasi investasi asing, terutama untuk proyek infrastruktur skala besar. Ini akan

membantu memastikan bahwa kesepakatan dengan kedua kekuatan besar tersebut menguntungkan kepentingan nasional jangka panjang.

5. **Peningkatan Kapasitas Diplomasi Ekonomi:** Sebagaimana diargumentasikan oleh Rahman (2021) dalam studinya tentang diplomasi ekonomi Indonesia dalam konteks BRI, penguatan kapasitas negosiasi dalam diplomasi ekonomi merupakan kunci untuk memaksimalkan manfaat dari inisiatif infrastruktur China sambil meminimalkan risiko ketergantungan dan utang.
6. **Membangun Ketahanan Nasional:** Indonesia perlu mengembangkan pendekatan komprehensif untuk ketahanan nasional yang mencakup keamanan ekonomi, ketahanan siber, keamanan maritim, dan ketahanan energi untuk melindungi kepentingan nasionalnya di tengah meningkatnya tekanan geopolitik.

Daftar Pustaka

- ASEAN Secretariat. (2023). *ASEAN Statistical Yearbook 2023*. Jakarta: ASEAN Secretariat. (n.d.).
- Campbell, C., & Salidjanova, N. (n.d.). *South China Sea Arbitration Ruling: What Happened and What's Next?*
- CSIS. (2022). [Center for Strategic and International Studies report on South China Sea]. (n.d.).
- Fathurrahman, M. (2018). Kebijakan Ekonomi Indonesia di Era Persaingan Global. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam*, 4(2), 56-78. <http://repository.uin-malang.ac.id/2453>
- Global Communications And Media Relations, Myo AUNG Myanmar, & Global Communications And Media Relations USA. (2021). *China's Belt and Road-Implications for the United States*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36198.96329>
- Gordon, S. M., Mullen, M. G., & Sacks, D. (n.d.). *U.S.-Taiwan Relations in a New Era*.
- Kementerian Perdagangan RI. (2023). *Statistik Perdagangan Indonesia-China 2023*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI. (n.d.).
- Munir, A. (2019). Komunikasi Politik dan Diplomasi Indonesia dalam Merespon Kebangkitan China. *Journal of International Relations*, 3(2), 45-59. <http://repository.uin-malang.ac.id/4837>
- Moses, O., Ngu, D., Engel, L., & Kedir, A. (n.d.). *China-Africa Economic Bulletin*.
- Naughton, B., Cheung, T. M., Xiao, S., Xu, Y., & Yang, Y. (n.d.). *Reorganization of China's Science and Technology System*.
- Rahmati, A. (2022). Pengaruh Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok Terhadap Dinamika Ekonomi Politik di Asia Tenggara. *Journal of International Relations Studies*, 4(1), 45-63. <http://repository.uin-malang.ac.id/8254>
- SIA_State-of-Industry-Report_2023_Final_080323. (n.d.).
- SIPRI. (2023). [Stockholm International Peace Research Institute data on defense spending]. (n.d.).
- World Bank. (2023). [World Bank data on China's economic growth]. (n.d.).
- Zhang, B. (2019). *Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* (London: Scribe, 2017.) 364p. \$ 13.00 Paperback. *Journal of*

Chinese Political Science, 24(4), 707–708. <https://doi.org/10.1007/s11366-019-09631-0>